



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UMI HERAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. NHK : 837824

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.690.000.000**

1. Bangunan Seluas 12 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 280.000.000
5. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/166 m2 di KAB / KOTA
KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 715.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/220 m2 di KAB / KOTA
KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 1.130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **482.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
12.500.000
3. MOBIL, MITSUBISHI L300 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
44.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



18.000.000

5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

18.000.000

6. MOTOR, HONDA STILO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

26.000.000

7. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

360.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 83.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 333.608.623****F. HARTA LAINNYA****Rp. 119.000.000****Sub Total****Rp. 3.707.608.623****III. HUTANG****Rp. 20.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.687.608.623**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.